



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020*

**Diplomasi Komersial Indonesia dan Aljazair untuk**  
**Mengatasi Kelangkaan Minyak Bumi: Dimensi**  
**Ketersediaan dan Keberlanjutan**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Dara Sheila Mercyana

2016330097

**Bandung**

**2020**



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020*

**Diplomasi Komersial Indonesia dan Aljazair untuk**  
**Mengatasi Kelangkaan Minyak Bumi: Dimensi**  
**Ketersediaan dan Keberlanjutan**

Skripsi

Oleh

Dara Sheila Mercyana

2016330097

Pembimbing

Sukawarsini Djelantik, Ph.D.

**Bandung**

**2020**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Hubungan Internasional  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Dara Sheila Mercyana  
Nomor Pokok : 2016330097  
Judul : Diplomasi Komersial Indonesia dan Aljazair untuk  
Mengatasi Kelangkaan Minyak Bumi: Dimensi  
Ketersediaan dan Keberlanjutan

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 29 Juli 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Mireille Marcia Karman, S.Sos., M.Litt

: 

**Sekretaris**

Sukawarsini Djelantik, Ph.D.

: 

**Anggota**

Giandi Kartasmita, S. IP., MA

: 

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dara Sheila Mercyana  
NPM : 2016330097  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Aljazair Melalui  
Diplomasi Komersial untuk Mengatasi Kelangkaan  
Minyak Bumi: Dimensi Ketersediaan dan Keberlanjutan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Juli 2020



Dara Sheila Mercyana

## Abstrak

Nama : Dara Sheila Mercyana  
NPM : 2016330097  
Judul : Diplomasi Komersial Indonesia dan Aljazair untuk Mengatasi Kelangkaan Minyak Bumi: Dimensi Ketersediaan dan Keberlanjutan

---

Salah satu sasaran strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah memprioritaskan diplomasi ekonomi dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Dengan mendorong kerja sama antar perusahaan milik nasional dan swasta, diharapkan dapat memberikan keuntungan bersama terkait kepentingan masing-masing negara. Menghadapi sejumlah permasalahan minyak bumi, Indonesia dan Aljazair sepakat melakukan kerja sama ekonomi melalui diplomasi komersial. Upaya tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) melakukan promosi perdagangan dan (2) promosi peluang investasi. Pencapaian ini memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Indonesia mendapat tambahan suplai minyak sehingga ada jaminan ketersediaan minyak bumi bagi generasi yang akan datang. Sementara itu, Aljazair dapat mengembangkan perekonomian negara yang berorientasi pada ekspor dalam menghadapi penurunan harga minyak dunia. Mengingat pendapatan utama negara pengekspor ini adalah dari penjualan minyak bumi. Penulis menggunakan konsep diplomasi komersial yang dijelaskan oleh Saner dan Yiu. Aktor dalam diplomasi komersial terdiri dari *Trade Promotion Organization* (TPO) dan/atau *Investment Promotion Agency* (IPA). Kemlu RI membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Diplomasi Ekonomi untuk memudahkan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam diplomasi ekonomi Indonesia. Dalam praktik diplomasi komersial ini Pokja melibatkan aktor seperti, Kementerian energi dan sumber daya mineral, Kementerian perdagangan; dan pelaku usaha milik nasional dan swasta terkait.

Kata kunci: Indonesia, Aljazair, Minyak Bumi, Kerja Sama Ekonomi, Diplomasi Komersial, Promosi Perdagangan, Promosi Peluang Investasi

## ***Abstract***

*Name* : Dara Sheila Mercyana

*Student Number* : 2016330097

*Title* : *Commercial Diplomacy between Indonesia and Algeria to overcome the Scarcity of Petroleum: Dimensions of Availability and Sustainability*

---

*One of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia's objectives during President Joko Widodo administration was to prioritize economic diplomacy to secure national interests. Cooperation between national and private-owned companies are encouraged, as it's projected to provide mutual benefits related to the interests of both sides. Facing a number of petroleum problems, Indonesia and Algeria agreed to conduct economic cooperation through commercial diplomacy. These efforts were carried out in two ways, namely: (1) promoting trade and (2) promoting investment opportunities. This achievement is beneficial for both parties. Indonesia receives additional access to oil which creates a guaranteed supply for a fixed term. Meanwhile, Algeria is able to develop their economy which is export-oriented in the face of falling world oil prices, given the main income comes from petroleum sale. The author uses the concept of commercial diplomacy described by Saner and Yiu. Actors in commercial diplomacy consist of the Trade Promotion Organization (TPO) and / or Investment Promotion Agency (IPA). The Indonesian Ministry of Foreign Affairs established a Working Group (Pokja) on Economic Diplomacy to facilitate coordination between actors involved in Indonesia's economic diplomacy. In this commercial diplomacy practice the Pokja involves actors such as, the Ministry of energy and mineral resources, the Ministry of trade; and related national and private business actors.*

*Keywords: Indonesia, Algeria, Petroleum, Economic Cooperation, Commercial Diplomacy, Trade Promotion, Investment Opportunity Promotion*

## Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah-Nya yang telah memberikan hikmat kepada penulis sejak awal masa seminar hingga dapat menyelesaikan skripsi. Penelitian ini berjudul **“Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Aljazair Melalui Diplomasi Komersial untuk Mengatasi Kelangkaan Minyak Bumi: Dimensi Ketersediaan dan Keberlanjutan,”** diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan dan memperoleh gelar Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian ini membahas diplomasi komersial Indonesia untuk mengatasi kelangkaan minyak bumi. Indonesia memanfaatkan hubungan historisnya untuk melakukan kerja sama ekonomi dengan Aljazair. Upaya ini sejalan dengan mandat Presiden Joko Widodo, memprioritaskan diplomasi ekonomi untuk mencapai kepentingan negara. Suplai tambahan bagi cadangan minyak bumi menjadi kepentingan nasional Indonesia di negara kawasan Afrika Utara ini. Kawasan tersebut merupakan sasaran bagi pasar non-tradisional Indonesia karena potensinya yang besar untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Adanya keterikatan sejarah memperkuat kerja sama kedua negara.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat secara khusus bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional terkait isu diplomasi. Penulis sadar bahwa masih terdapat kekurangan di dalam penelitian ini dan sangat terbuka untuk menerima saran atau kritik. Lebih dari itu penulis juga berharap dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 10 Juli 2020



Dara Sheila Mercyana

## Ucapan Terima Kasih

*“I don’t mean that we are able to do anything good ourselves. It is **God** who makes us able to do all that we do.”*

**2 Corinthians 3:5**

Tidak pernah terpikirkan dan terbayangkan bahwa tahun 2020 akan terjadi pandemi *Covid-19* yang akhirnya mengharuskan semua orang melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing untuk mencegah penularan virus. Tidak seperti biasanya, seluruh aktivitas dilakukan dari rumah agar mengurangi aktivitas di luar. Begitu juga dengan penyelesaian skripsi ini, penulis menyelesaikannya di rumah. Terkadang merasa bosan, jenuh, kurang inspirasi, dan lain-lain. Tetapi setelah itu semua berhasil dilewati dan disyukuri ternyata banyak hal positif yang didapat selama mengerjakan skripsi di rumah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tertulis di bawah ini karena telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini:

1. Yang pertama dan selalu yang terutama penulis mengucapkan syukur kepada Sang Pencipta, **Tuhan Yesus Kristus**. Hanya karena anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dikala menghadapi hambatan dalam penelitian, Ia selalu memberikan ketenangan, hikmat, dan jalan keluar yang tidak pernah penulis pikirkan, semua yang Ia buat ajaib dan dahsyat.
2. Terima kasih kepada **Papa** dan **Mama** yang selalu memberikan dukungan berupa moral dan materil, bahkan doa yang selalu mereka



panjatkan. Kesuksesan ini untuk Papa, Mama, dan kemuliaan Tuhan Yesus.

3. **Juan dan Ivan**, kedua adik laki-laki penulis yang selalu menjadi *support system* 24 jam x 7 hari. Mereka masih harus melakukan kegiatan Pembelajaran dari Rumah (PDB) selama pandemi ini. Mereka berdua merupakan sosok adik yang selalu menghibur penulis selama mengerjakan skripsi di rumah.
4. **Yedija, Feren, Raisa**. Sahabat penulis sejak masih duduk di bangku TK. **Selin**, sahabat sejak SMA. Mereka merupakan tempat untuk berbagi cerita perjuangan selama kuliah hingga penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang setia. **Samuel, Kevin, Kharis, Blofel, Aldo, Dillo, Jaya**. Sahabat yang selalu mendukung dan menemani penulis mengerjakan skripsi dimanapun dan kapanpun sejak sebelum pandemi ini terjadi. *I know that you all will always have my back, because that is the kind of you guys!*
5. **Denatalie dan Yosefin**. *You both are amazing. I am so glad that you are my BEST FRIENDS*. Ketika mereka berdua sudah lulus lebih dahulu, itulah yang menjadi motivasi untuk penulis segera menyelesaikan skripsi. Semoga kita bisa terus bersama dalam menghadapi tantangan hidup selanjutnya.
6. **Ibu Sukawarsini Djelantik, Ph.D.** Dosen pembimbing yang selalu sabar dan perfeksionis. Terima kasih telah membimbing dan membuat penulis bangga terhadap karya ilmiah yang penulis kerjakan.

7. **Bapak I Nyoman Sudira, M.Si.** Dosen favorit sejak pertama kali diajar olehnya. Terima kasih untuk segala bimbingan dan arahan selama mengenyam pendidikan di HI Unpar. Akan selalu saya ingat kebaikan Bapak kepada saya.
8. **Maria Putri, Atika, Keke, Vena, Lilis, Epe, Glory, Kirey, Astrid, Stella Nongka, Levin, Grace Kalangit, Ci Jane, Geye, Audri, Olin, Devi, Siska, Cindy, Fanya, dan teman-teman HI Unpar lainnya.** Kenangan bersama mereka selama masa perkuliahan tidak bisa dilupakan. Terima kasih telah menemani perjuangan penulis sampai masa akhir perkuliahan. Tetap semangat dalam meraih cita-cita!
9. **Ephen, Novia, Yafet, Umbu, Jonny.** Kakak-kakak rohani yang selalu mendoakan dan menghibur penulis dikala lelah datang, dan selalu memberikan semangat.
10. **Pemuda/i GKII Pniel Bandung.** Mereka adalah Adik dan Kakak rohani yang selalu ada untuk penulis, terima kasih untuk semangat dan doa yang selalu kalian berikan. *God bless you all!*
11. **Keluarga besar GKII Pniel** yang selalu mendukung penulis dalam doa. Terima kasih untuk semangat yang tidak pernah berhenti, mengajarkan untuk selalu berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Tetap semangat, berbuah bagi Kristus!

## Daftar Isi

Abstrak .....	i
<i>Abstract</i> .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Ucapan Terima Kasih.....	iv
Daftar Isi .....	vii
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Grafik .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	12
1.2.2 Perumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	14
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	15
1.4 Kajian Literatur .....	15
1.5 Kerangka Pemikiran.....	22
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
1.6.1 Metode Penelitian .....	32
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	33
1.7 Sistematika Pembahasan .....	33
BAB II PERMASALAHAN MINYAK BUMI DI INDONESIA: DIMENSI KETERSEDIAAN DAN KEBERLANJUTAN.....	35
2.1 Kesenjangan <i>Supply</i> dan <i>Demand</i> .....	35
2.2 Sektor Minyak Bumi: Bukan Komoditas Strategis.....	40
2.3 Inkonsistensi Pada Transisi Penggunaan Energi Terbarukan .....	42
2.4 Kesenjangan Harga dan Aksesibilitas Masyarakat Rendah.....	47

2.5 Usia Cadangan Minyak Bumi Tidak Panjang Lagi.....	49
2.6 Hubungan Bilateral Indonesia – Aljazair .....	53
2.6.1 Inisiasi Kontak .....	53
2.6.2 Pertukaran Kunjungan.....	55
2.6.3 Kerja Sama Ekonomi .....	57
2.6.4 Berbagi Kepentingan dalam Organisasi Internasional .....	59
2.6.5 Kerja Sama Sosial dan Budaya .....	60
2.6.6 Kerja Sama Regional .....	62
<b>BAB III PENCAPAIAN ASET LUAR NEGERI INDONESIA DI WILAYAH ALJAZAIR BAGI KEAMANAN MINYAK BUMI: DIMENSI KETERSEDIAAN DAN KEBERLANJUTAN.....</b>	<b>65</b>
3.1 Prioritas Kebijakan Diplomasi Indonesia .....	65
3.2 Upaya-upaya Diplomasi Komersial Indonesia Terhadap Aljazair.....	69
3.2.1 Meningkatkan Ekspor Barang dan Jasa .....	69
3.2.2 Promosi Peluang Investasi .....	77
3.3 Hasil Diplomasi Komersial Pada Sektor Minyak Bumi di Indonesia.....	80
3.3.1 Lapangan Minyak Bumi Baru di Aljazair .....	80
3.3.2 Adaptasi Pemanfaatan Energi Terbarukan.....	81
<b>BAB IV .....</b>	<b>83</b>
Daftar Pustaka .....	85

## Daftar Tabel

Tabel 2.1 Cadangan Minyak Bumi Indonesia 2014-2016 dalam satuan miliar barel per hari .....	35
Tabel 2.2 Lima Negara Penghasil <i>Geothermal</i> Terbesar dalam satuan MWe = <i>megawatt electrical</i> .....	44
Tabel 3.1 Perbandingan <i>Debt to GDP Ratio</i> Aljazair dan Indonesia per 2014 dan 2018.....	68

## **Daftar Gambar**

Gambar 2.1 Peta Sebaran Kilang Minyak di Indonesia 2014 .....	48
---	----

## **Daftar Grafik**

Grafik 2.1 Pemanfaatan Minyak Bumi di Indonesia Tahun 2014.....	37
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kontestasi perekonomian dunia yang cenderung mengarah pada ketidakpastian menjadi pemicu negara untuk berusaha memperkuat kondisi perekonomiannya agar dapat bertahan di tengah persaingan global. Sejak periode pertamanya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sadar akan pentingnya mengatur strategi pada sektor ekonomi, politik, dan keamanan sebagai kekuatan negara yang perlu dijaga agar mencapai stabilitas dalam menghadapi persaingan global. Jokowi membentuk program kerja yang disebut dengan Nawa Cita sebagai visi misi negara yang akan dicapai selama masa pemerintahannya lima tahun ke depan.<sup>1</sup> Berulang kali beliau menegaskan bahwa kepentingan nasional perlu diperjuangkan dengan maksimal oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) atau diplomat sebagai perwakilan negara di luar negeri dengan mengutamakan diplomasi ekonomi. Selain memperjuangkan kepentingan nasional, upaya ini diharapkan dapat membangkitkan kembali neraca perdagangan Indonesia yang sempat turun.<sup>2</sup>

Negara-negara di dunia saat ini sedang gencar mengupayakan diplomasi ekonomi dalam mengejar kepentingan nasional. Pada dasarnya negara berkembang cenderung melakukan diplomasi ekonomi karena membutuhkan

<sup>1</sup> Humphrey Wangke, *Tantangan dan Peluang Diplomasi Ekonomi Presiden Joko Widodo* (Jakarta: P3DI, 2015).

<sup>2</sup> FISIP UPH dan Centre for International Trade and Investment UPH, *Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi* (Jakarta: BPPK, 2015).



suatu sistem yang dapat mendorong kemajuan ekonomi negaranya.<sup>3</sup> Adanya keterbatasan dalam mengolah sumber daya yang dimiliki, menjadi faktor pendorong untuk melakukan diplomasi ekonomi.<sup>4</sup> Sementara itu, negara-negara besar seperti di Eropa dan Amerika melakukan diplomasi ekonomi didorong oleh kepentingan negara untuk meningkatkan perdagangan sebagai sasaran utama dalam berdiplomasi.<sup>5</sup> Negara maju melakukan diplomasi ekonomi karena memiliki kepentingan dagang untuk disebarluaskan ke negara lain.<sup>6</sup> Dua kondisi yang berbeda ini melatarbelakangi negara untuk membangun kerjasama. Prioritas kebijakan diplomasi Indonesia didasari pada politik luar negeri “Bebas dan Aktif,” didampingi oleh program Nawa Cita. Diplomasi komersial yang dilakukan antara Indonesia dan Aljazair adalah bagian dari kegiatan diplomasi ekonomi. Dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional sekaligus memanfaatkan panggung internasional, membuktikan bahwa ekonomi Indonesia mampu bersaing dengan negara lain.

Menghadapi percepatan pertumbuhan industri, Indonesia perlu meningkatkan keamanan energinya secara khusus pada aspek ketersediaan dan keberlanjutan. Indonesia merupakan negara yang masih mengkonsumsi minyak bumi dengan jumlah besar. Energi fosil tersebut paling banyak digunakan untuk kebutuhan

<sup>3</sup> Winston Dookeran dan Preeya S. Mohan, “Small State Diplomacy and Global Competitiveness,” *University of the West Indies Vol.2, No. 1* (2019): 69-82.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

industri dan transportasi.<sup>7</sup> Eskalasi pertumbuhan penduduk Indonesia juga memicu peningkatan konsumsi minyak bumi. Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk rata-rata 1,32% atau sekitar tiga juta penduduk setiap tahun.<sup>8</sup> Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia sebesar 255 juta jiwa.<sup>9</sup> Bertambahnya penduduk pada suatu negara mengindikasikan akan adanya peningkatan permintaan terhadap kebutuhan masyarakat. Permasalahan ini menjadi tuntutan bagi negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nasional. Sehingga perlu mengusahakan sumber daya alamnya agar tercapai kesejahteraan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Minyak bumi adalah bahan baku yang menjadi penopang bagi perekonomian negara. Kontribusi sektor minyak bumi bagi pendapatan negara sangat berpengaruh, terbukti memberikan pendapatan sebesar 13% pada APBN Indonesia.<sup>10</sup> Meskipun nilai tersebut menunjukkan penurunan yang cukup jauh, karena sebelumnya pada tahun 1990 mampu memberikan kontribusi jauh lebih besar hingga 40%.<sup>11</sup> Penurunan angka ini menjadi motivasi Indonesia untuk terus

<sup>7</sup> Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, *Ketahanan Energi Indonesia 2015* (Jakarta: DEN, 2015), hlm 10.

<sup>8</sup> Ibid, hlm 11.

<sup>9</sup> The World Bank, "Indonesia", *Population Total*, diakses pada 20 Februari 2019, <https://data.worldbank.org/country/indonesia?view=chart>

<sup>10</sup> "Minyak Bumi: Produksi & Konsumsi Minyak Mentah," *Indonesia Investments*, 4 Juli 2016, diakses pada 18 September 2019, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267>

<sup>11</sup> Ibid.

meningkatkan pertumbuhannya pada neraca perdagangan.<sup>12</sup> Maka dari itu ketersediaan energi mempengaruhi stabilitas negara dan oleh karena itu minyak bumi menjadi kebutuhan negara yang krusial.

Selain itu, kurangnya aktivitas eksplorasi juga menyerap jumlah cadangan minyak bumi di Indonesia. Hambatan teknologi untuk melakukan eksplorasi menjadi alasan klasik. Modal besar yang dibutuhkan untuk melakukan eksplorasi pada lapangan minyak baru dan minimnya peluang bagi investor untuk masuk dan melakukan eksplorasi juga menjadi masalah.<sup>13</sup> Jumlah konsumsi yang meningkat setiap tahun, membuat negara perlu mempersiapkan cadangan minyak lebih banyak lagi untuk generasi berikutnya. Akan tetapi minyak bumi tidak selamanya menjadi energi fosil yang dapat diandalkan sebagai penopang negara. Sifatnya yang tidak dapat diperbaharui membuat energi tersebut akan habis jika dikonsumsi secara terus-menerus. Minyak bumi termasuk kebutuhan negara yang cukup mendesak maka pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengimpor minyak bumi daripada mengumpulkan modal untuk melakukan eksplorasi. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (*SKK Migas*) Indonesia berupaya meningkatkan produksi minyak bumi dengan membangun aset luar negeri yaitu di Aljazair. Aset tersebut dioperasikan oleh anak perusahaan *PT. Pertamina* yaitu *PIEP* (Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi). Indonesia memanfaatkan hubungannya dengan Aljazair oleh

<sup>12</sup> FISIP UPH dan Centre for International Trade and Investment UPH, *Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian Perdagangan dan Investasi* (Jakarta: BPPK, 2015).

<sup>13</sup> Biro Riset LM FEUI, "Analisis Industri Minyak dan Gas di Indonesia: Masukan bagi Pengelola BUMN," *LM FEUI*, diakses pada 20 Februari 2019, <http://www.lmfeui.com/data/Analisis%20Industri%20Minyak.pdf>

karena keterikatan sejarah. Melalui hubungan diplomatik yang terpelihara baik sejauh ini, diharapkan dapat membuka peluang dan memudahkan untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan minyak bumi yang sedang Indonesia hadapi.

Berbicara mengenai keamanan energi, menandakan adanya krisis yang mengancam keamanan energi tersebut. Pada dekade 1990-an Indonesia memiliki keunggulan pada sektor minyak bumi. Kemampuan Indonesia dapat memproduksi hingga menyentuh angka 1,6 juta barel per hari (bph) menjadi potensi untuk bekerja sama dengan negara-negara besar di dunia hingga tergabung dalam *Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC)* pada tahun 1962.<sup>14</sup> Tujuan utama organisasi tersebut adalah membuat kebijakan untuk menjaga harga minyak dunia tetap stabil, terhindar dari fluktuasi, dan dapat memenuhi kebutuhan minyak bumi bagi negara-negara di dunia.<sup>15</sup> OPEC memegang peranan penting bagi cadangan minyak dunia, sebesar 78% ada ditangan negara-negara anggota.<sup>16</sup> Namun, kontribusi Indonesia dalam OPEC hanya sementara waktu saja. Indonesia mencapai titik terendah penurunan jumlah produksi pada tahun 2015 dengan menyentuh angka 786.000 barel per hari (bph).<sup>17</sup> Kondisi ini akhirnya mendesak Indonesia untuk keluar dari OPEC sebagai salah satu negara pengekspor minyak bagi dunia. Penurunan produksi minyak bumi Indonesia sejak 2015 pada angka

<sup>14</sup> “Indonesia Keluar dari OPEC,” *Kementerian ESDM*, 29 Mei 2008, diakses pada 20 Februari 2019, <https://migas.esdm.go.id/post/read/Indonesia-Keluar-dari-OPEC>

<sup>15</sup> OPEC, *Statute 2012, Chapter I, Article 2* (Vienna: OPEC, 2012).

<sup>16</sup> Gal Luft dan Anne Korin, *Energy Security Challenges for the 21st Century: A Reference Handbook* (California: ABC-CLIO, LLC, 2009), hlm 2.

<sup>17</sup> “Minyak Bumi: Produksi & Konsumsi Minyak Mentah,” *Indonesia Investments*, 4 Juli 2016, diakses pada 18 September 2019, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267>

delapan ratus ribu barel per hari (bph) berlanjut hingga 2018, sanggup bergerak naik namun hanya mencapai seratus ribu.<sup>18</sup> Sedangkan kebutuhan energi minyak bumi Indonesia dalam sehari sebesar 1,6 juta barel per hari (bph).<sup>19</sup> Berdasarkan data pada *US Energy Information Administration* (EIA), untuk mengatasi ketimpangan tersebut Indonesia membeli minyak bumi melalui pihak ketiga, serta mengupayakan akses pada sumber ketersediaan minyak mentah untuk jangka panjang melalui proses negosiasi yang dibuat antara perusahaan minyak nasional dari negara lain.<sup>20</sup> Hal ini juga sejalan dengan kerja sama antara perusahaan minyak nasional Indonesia dan Aljazair.

Cadangan minyak bumi Indonesia juga mengalami penurunan dari 5,9 miliar barel menjadi 3,7 miliar barel pada akhir tahun 2014, sangat jauh jika dibandingkan dengan negara pengekspor minyak besar seperti Arab Saudi yang memiliki cadangan hingga 300 miliar barel.<sup>21</sup> Kondisi ini diikuti juga dengan tingginya jumlah konsumsi pada minyak bumi. Konsumsi energi terbesar Indonesia adalah minyak bumi. Dalam kurun waktu satu dekade, terhitung sejak 2003-2013 total konsumsi meningkat sebesar 43%.<sup>22</sup> Apabila hanya

<sup>18</sup> “Minyak Bumi: Produksi & Konsumsi Minyak Mentah,” *Indonesia Investments*, 4 Juli 2016, diakses pada 18 September 2019, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267>

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> US Energy Information Administration, “*Indonesia Country Analysis Brief*” (Washington DC: EIA, 2015), hlm 3.

<sup>21</sup> “Minyak Bumi: Produksi & Konsumsi Minyak Mentah,” *Indonesia Investments*, 4 Juli 2016, diakses pada 18 September 2019, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-bumi/item267>.

<sup>22</sup> US Energy Information Administration, “*Indonesia Country Analysis Brief*” (Washington DC: EIA, 2015), hlm 1.

mengandalkan cadangan minyak bumi nasional yang jumlahnya terbatas, maka dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan, dapat diprediksi Indonesia akan kehabisan sumber energinya dan berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik negara.

Aljazair adalah salah satu negara anggota OPEC yang memiliki hubungan dekat dengan Indonesia oleh karena adanya keterikatan sejarah. Dalam sektor minyak bumi, Indonesia dan Aljazair sudah bekerjasama sejak kedua negara bergabung dalam OPEC pada tahun 1962. Diluar itu kedua negara juga melakukan kerjasama bilateral pada sektor minyak bumi melalui perusahaan nasional milik negara antara *PT. Pertamina* (Indonesia) dan *Sonatrach* (Aljazair). Kerjasama tersebut menghasilkan nota kesepahaman “*Memorandum Saling Pengertian antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Negara (Pertamina) of the Republic of Indonesia and Societe Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures (Sonatrach) mengenai Pengembangan Kerjasama di bidang Minyak dan Gas Bumi (MoU between National Oil Company / Pertamina of Indonesia and Sonatrach, Algeria for Oil and Natural Gas Development Cooperation)*” yang disahkan pada tahun 2002.<sup>23</sup> Kerjasama Indonesia dan Aljazair masih berjalan hingga penelitian ini dilakukan, hubungan

<sup>23</sup> “Kesepakatan Bilateral RI-Aljazair,” *KBRI di Alger*, diakses pada 20 Oktober 2019, <https://kemlu.go.id/algiers/id/read/kesepakatan-bilateral-ri-aljazair/1676/etc-menu>

diplomatik terpelihara dengan baik, khususnya dalam permasalahan energi menjadi fondasi penting dari kerjasama yang dilakukan.<sup>24</sup>

Aljazair berkontribusi dengan memberikan 1% dari total cadangan minyaknya bagi dunia.<sup>25</sup> Kemampuan dalam memproduksi minyak bumi tidak kalah hebat dengan negara anggota OPEC lainnya. Aljazair mampu mengolah kekayaan energi fosil yang dimiliki dengan maksimal dan menjadikan sektor migas tersebut sebagai tulang punggung utama bagi perekonomian negaranya.<sup>26</sup> Berbeda dengan Indonesia, konsumsi energi Aljazair bertumpu pada gas alam.<sup>27</sup> Maka ada peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan sumber minyak bumi dengan mempererat hubungan kerjasama dengan Aljazair, dalam rangka memenuhi kebutuhan minyak bumi nasional yang mengalami defisit. Lebih dari itu diharapkan juga dapat memenuhi kebutuhan hingga jangka waktu yang lebih panjang melalui aset luar negeri yang telah dibangun di Aljazair.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Kebutuhan terhadap energi secara khusus pada minyak bumi menjadi kepentingan nasional yang diperjuangkan oleh negara-negara. Kenyataan bahwa tidak semua negara memiliki sumber minyak bumi yang memadai di wilayah

<sup>24</sup> Muhammad Zulkiflar Rakhmat, "Under the Radar: Indonesia's Relation with Algeria," *The Diplomat*, 13 April 2017, diakses pada 20 Oktober 2019, <https://thediplomat.com/2017/04/under-the-radar-indonesias-relations-with-algeria/>

<sup>25</sup> "OPEC Share of World Crude Oil Reserves," *OPEC*, diakses pada 20 Oktober 2019, [https://www.opec.org/opec\\_web/en/data\\_graphs/330.htm](https://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm)

<sup>26</sup> "Country Analysis Executive Summary: Algeria," *US Energy Information Administration* (Washington DC: EIA, 2019).

<sup>27</sup> Ibid.

negaranya, menjadikan sumber energi ini diperebutkan oleh negara-negara yang masih bergantung pada sumber energi fosil, Indonesia salah satunya. Melakukan pendekatan dengan meningkatkan relasi dengan negara-negara pengeksport minyak bumi adalah langkah awal untuk mendapatkan suplai tambahan minyak bumi bagi kebutuhan nasional. Upaya tersebut sudah biasa dilakukan oleh banyak negara sejak masa perebutan minyak bumi yang terjadi pada periode Perang Dunia I. Indonesia terlambat melakukan peningkatan pendekatan dengan salah satu negara sahabatnya yaitu Aljazair. Hubungan kedua negara telah terjalin sejak Aljazair masih di bawah penjajahan. Namun, Indonesia baru memulai keseriusannya untuk bekerja sama dalam sektor minyak bumi pada tahun 2013 ketika muncul tanda-tanda penurunan produksi yang tidak kunjung henti.

Permasalahan kedua ialah lambatnya aktivitas eksplorasi pada lapangan minyak di Indonesia oleh karena hambatan eksternal dan internal. Untuk melakukan eksplorasi di wilayah Indonesia dari Barat sampai ke Timur dibutuhkan modal yang sangat besar. Sehingga Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang baik agar dapat menarik investor. Rendahnya tingkat realisasi investasi pada proyek-proyek eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan minyak bumi nasional dipengaruhi juga oleh kondisi harga minyak dunia yang sedang mengalami penurunan. Hambatan eksternal tersebut menyebabkan realisasi investasi pada tahun 2014 turun sebanyak 53%. Sedangkan hambatan internal datang dari respon masyarakat yang keberatan karena mempertimbangkan dampak lingkungan sekitar wilayah eksplorasi seperti perkebunan, hutan industri,



dan hutan lindung; masalah administratif; masalah finansial; dan masalah teknis operasional.<sup>28</sup>

Hambatan pada biaya eksplorasi mengakibatkan produksi minyak bumi Indonesia tidak berjalan baik dan kesulitan mencari cara dalam mengatasi masalah keterbatasan ketersediaan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Permasalahan minyak bumi di Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan impor minyak bumi dari luar negeri secara persisten. Indonesia juga tidak dapat memanfaatkan minyak bumi sebagai penopang bagi perekonomian negara. Melalui kerja sama ekonomi dengan Aljazair, diharapkan dapat memberi peluang untuk mendapatkan suplai tambahan minyak bumi bagi kebutuhan nasional.

Permasalahan ketiga ialah ketergantungan impor minyak bumi dapat membahayakan bagi kedua pihak, secara khusus bagi negara pengekspor. Minyak bumi akan habis jika terus dikonsumsi dalam jumlah besar setiap tahunnya. Sifat ketergantungan ini dapat merugikan negara yang bersangkutan, secara tidak langsung mengancam keamanan energi negara lain. Maka dari itu Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan bantuan ketersediaan minyak bumi dari pihak luar saja tetapi perlu juga memulai adaptasi pada penggunaan sumber energi terbarukan seperti *hydropower*, nuklir, sinar matahari, dan angin sebagai pengganti minyak bumi.<sup>29</sup> Bagi negara pengekspor minyak bumi, seperti Aljazair, sektor ini merupakan bagian terpenting karena sumber utama pendapatannya berasal dari penjualan minyak bumi. Ketika harga minyak dunia sedang turun maka

<sup>28</sup> SKK Migas, *Laporan Tahunan 2015* (Jakarta: SKK Migas, 2015), hlm 31.

<sup>29</sup> Daojiong Zha, ed., *Energy Security* (Chennai: SAGE Publication, 2016), hlm 140.

kondisi inilah yang menjadi ancaman terbesar bagi perekonomian Aljazair. Negara sahabat Indonesia ini perlu mengembangkan sektor ekonominya agar tidak melulu mengandalkan minyak bumi sebagai sumber pendapatan utama negara dengan melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara.

Paparan di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang sedang dihadapi Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Indonesia memanfaatkan kedekatannya dengan Aljazair melalui diplomasi komersial. Keterikatan sejarah membentuk hubungan antara Indonesia dan Aljazair menjadi negara sahabat sebagai perwujudan dari mandat konstitusi Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Selain itu, kedua negara juga memiliki kesamaan mayoritas penduduk beragama muslim terbesar. Fakta tersebut menunjukkan kesamaan yang mendasari terbentuknya hubungan bilateral antara kedua negara dan memudahkan dalam bekerja sama. Selanjutnya, sangatlah penting untuk mendapatkan kejelasan jika Indonesia melalui diplomasi komersialnya ingin mencapai kepentingan nasional, setidaknya mampu berkontribusi dengan tindakan nyata bagi keamanan energi nasional melalui promosi perdagangan dan promosi peluang investasi dengan Aljazair. Atas dasar alur berpikir dan paparan fakta-fakta di atas maka kajian mengenai “Diplomasi Komersial Indonesia dan Aljazair untuk Mengatasi Kelangkaan Minyak Bumi: Dimensi Ketersediaan dan Keberlanjutan” menjadi sangat penting untuk dilakukan.

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Isu penelitian ini dibatasi pada kerja sama ekonomi Indonesia dan Aljazair melalui diplomasi komersial. Upaya diplomasi yang dilakukan mencakup kegiatan promosi perdagangan untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Aljazair dan promosi peluang investasi untuk membangun aset luar negeri di wilayah Aljazair. Menyikapi upaya tersebut Aljazair turut memberikan promosi peluang investasi kepada Indonesia. Diplomasi komersial ini dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perdagangan serta pelaku usaha terkait yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *PT. Pertamina* dan *PT. Wijaya Karya (WIKA)*. Aktor tersebut menjalankan tugasnya di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam Kelompok Kerja (Pokja) Diplomasi Indonesia. Upaya tersebut ditujukan untuk membantu mengatasi permasalahan pada kegiatan usaha hulu minyak bumi Indonesia yang mengalami penurunan produksi.

Pemahaman tentang keamanan energi pada setiap negara berbeda-beda, begitu juga dengan profesi-profesi yang menggeluti bidang energi. Dimensi keamanan energi yang dirumuskan oleh Mely Caballero ini diperuntukkan bagi politisi dan diplomat, yang mana sesuai dengan bidang dan topik penulis. Penelitian ini hanya berfokus pada dua dimensi keamanan minyak bumi yang dimaksudkan oleh Mely Caballero, yaitu keamanan pada ketersediaan (*security of supply*) dan keamanan yang berkelanjutan (*security as sustainability*). Penentuan dua dimensi ini

ditetapkan oleh karena peran Indonesia sebagai negara pengimpor perlu meminimalisir konsumsi minyak bumi. Memulainya dengan proses adaptasi penggunaan sumber energi terbarukan sebagai pengganti minyak bumi, dengan tetap memperhatikan keamanan energi yang berkelanjutan. Penelitian difokuskan pada kerangka waktu 2013 hingga 2018. Pada tahun 2013 Edy Hermanto, Menteri ESDM melakukan kunjungan ke Aljazair untuk menyampaikan kepentingan Indonesia di Aljazair terkait permasalahan minyak bumi yang sedang hadapi. Kunjungan tersebut menghasilkan kerja sama antar perusahaan minyak nasional, yang nantinya akan ditindaklanjuti secara langsung oleh perusahaan minyak nasional Indonesia, *PT. Pertamina*. Batas akhir kerangka waktu penelitian adalah tahun 2018, ditandai dengan berlangsungnya ajang Pameran Internasional Aljazair yang ke-51 (51<sup>ème</sup> FOIRE INTERNATIONALE D'ALGER / FIA) di Aljazair. Pameran ini dilaksanakan oleh pemerintah Aljazair dan turut mengundang 4 perusahaan dari Indonesia yang diharapkan dapat menjadi mitra perdagangannya. Upaya ini dilakukan Aljazair untuk menghadapi penurunan harga minyak dunia yang berdampak pada perekonomian negaranya. Alasan itulah yang dipakai untuk membatasi kerangka waktu penelitian berakhir di tahun 2018.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembahasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Bagaimana upaya-upaya diplomasi komersial Indonesia terhadap Aljazair dalam mengatasi kelangkaan minyak bumi di Indonesia pada dimensi ketersediaan dan keberlanjutan?”**

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis upaya-upaya diplomasi komersial yang dilakukan Indonesia dalam menghadapi masalah kelangkaan minyak bumi, agar mencapai keamanan pada dimensi ketersediaan dan keberkelanjutan. Penulis akan membahas bagaimana Indonesia menata hubungan diplomatiknya dengan Aljazair yang didorong oleh persamaan yang mendasar pada kedua negara, antara lain prinsip negara dalam menentang penjajahan, mendukung perdamaian dunia, dan status kedua negara sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar. Sehingga kedua negara memiliki kesepakatan untuk saling mendukung satu sama lain dalam bidang ekonomi dan politik. Melalui penelitian ini, penulis dan pembaca dapat melihat salah satu wujud nyata dijalankannya diplomasi ekonomi Indonesia dalam program Nawa Cita pada era pemerintahan Jokowi dengan tekad *“Diplomasi untuk Rakyat, Diplomasi Membumi.”*

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan referensi bagi para penstudi ilmu hubungan internasional mengenai isu diplomasi dan keamanan energi di Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi, politik, dan sumber daya. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi kajian tentang diplomasi komersial Indonesia dengan salah satu negara di Afrika Utara yaitu Aljazair untuk menjawab kebutuhan minyak bumi Indonesia. Selain itu juga menunjukkan bahwa industri Indonesia dapat dipandang di kawasan Afrika dan memiliki peluang besar untuk berkembang di pasar non tradisional tersebut. Peran aktor-aktor dalam praktik diplomasi komersial sangat membantu jalannya diplomasi, sehingga memperjuangkan kepentingan negara di luar negeri tidak melulu menjadi urusan para diplomat. Setiap aktor dapat saling bekerjasama dalam memperjuangkan kepentingan negara tanpa melupakan struktur dan manajemen yang ada baik di dalam dan di luar negeri.

### **1.4 Kajian Literatur**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sejumlah kajian literatur yang sudah dilakukan oleh peneliti lain untuk menyampaikan hasil penelitian yang terkait, agar memberi kontribusi dengan mengisi kekosongan pada penelitian sebelumnya. Selain itu, penulis memperkuat gagasan menggunakan teori dan konsep ilmu hubungan internasional sebagai landasan dari penelitian ini. Berikut artikel-artikel yang penulis dapatkan:

Artikel pertama ditulis oleh Sulthon Sjahril Sabaruddin yang berjudul *Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi* dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pada era pemerintahan Presiden Jokowi, program prioritas kebijakan luar negeri Indonesia ialah memperkuat kinerja diplomasi ekonomi pada diplomasi dagang daripada diplomasi politik. Tuntutan bagi para diplomat Indonesia adalah memahami lebih dalam kebutuhan negara tujuan untuk dapat memenuhi permintaannya. Adapun aspek penting yang menjadi perhatian khusus dalam diplomasi ekonomi ialah untuk meningkatkan perekonomian nasional seperti: meningkatkan aktivitas ekspor, investasi, dan kunjungan wisatawan mancanegara. Aspek tersebut menjadi penyumbang devisa negara seperti yang telah tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Sabaruddin mendapatkan bahwa dalam pelaksanaannya, diplomasi ekonomi Indonesia belum jelas arahnya dan tidak ada indeks pasti untuk dapat diukur, secara khusus pada aktivitas kerjasama ekonomi di pasar non tradisional.<sup>30</sup> Penelitian ini akan menunjukkan bahwa diplomasi komersial antara Indonesia dan Aljazair pada era pemerintahan Jokowi telah dilaksanakan melalui promosi perdagangan dan promosi peluang investasi, untuk membuktikan adanya kejelasan arah diplomasi ekonomi di Indonesia pada pasar non tradisional.

Artikel kedua ditulis oleh Athiqah Nur Alami yang berjudul *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Energi* dari Lembaga Ilmu Pengetahuan

<sup>30</sup> Sabaruddin, "Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan* 12, No. 1 (2016): 1-22, diakses pada 20 Februari 2019, <http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/view/2545>

Indonesia (LIPI). Nur Alami berargumen bahwa pemerintah Indonesia belum memanfaatkan migas sebagai komoditas strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung efektivitas dan optimalisasi diplomasi. Indonesia diharapkan dapat mengurangi ketergantungan energi dari sumber eksternal; pengendalian dan penguasaan terhadap wilayah yang menghasilkan energi dipegang oleh BUMN; membentuk regulasi yang membatasi konsumsi domestik; penyimpanan energi; dan penetapan harga energi oleh pemerintah. Penelitian ini akan meluruskan dengan kenyataan bahwa sektor migas di Indonesia tidak dapat diandalkan untuk mendukung optimalisasi diplomasi. Persediaan migas yang semakin menipis tidak dapat diandalkan sebagai komoditas strategis. Penanggung jawab pengelolaan usaha sektor migas, *PT. Pertamina* masih bergantung pada pihak eksternal. Menyikapi urgensi pada kelangkaan minyak bumi tersebut, Indonesia berupaya meningkatkan *supply side management*. Keberadaan pihak swasta multinasional nantinya diharapkan dapat mendukung peningkatan ketersediaan migas.<sup>31</sup> Seiring berjalannya waktu, Indonesia akan diarahkan untuk memulai transisi pemanfaatan energi terbarukan sebagai pengganti minyak bumi.

Artikel ketiga ditulis oleh Arshie Ramadhanie yang berjudul *Evolusi Konsep Keamanan Energi* dari Jurnal Politik Internasional yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia. Ramadhanie membahas mengenai perluasan konsep keamanan energi yang dimulai pada tahun 1970 hingga pasca 2010. Pada tahun 1970-an terjadi dua kali krisis minyak yang berdampak besar bagi dunia yang

<sup>31</sup> Athiqah Nur Alami, "Politik Luar Negeri dan Isu Keamanan Energi," *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia* 9, No. 2 (2012): 105-118, diakses pada 20 Februari 2019, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/234>



disebabkan oleh embargo minyak Arab dan pergantian rezim di Iran. Krisis minyak ini memberi dampak pada biaya ekonomi dan politik sehingga menyebabkan harga minyak melonjak tinggi. Kenaikan pada harga minyak memberi dampak pada aspek kehidupan manusia seperti pada aspek sosial dan ekonomi sehingga perubahan pada ketersediaan dan harga minyak mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Setelah mengalami krisis, ketersediaan minyak kembali berlimpah pada tahun 1980-an. Fokus dalam pengelolaan minyak yang berlimpah adalah pada infrastruktur, *supply-chain* industri energi, dan yang terpenting masalah distribusi, memberikan jaminan tersedianya akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat dalam suatu negara dengan menambahkan unsur keberlanjutan dan ramah lingkungan.<sup>32</sup>

Terdapat dua paradigma yang dapat membantu menjelaskan bagaimana negara memandang minyak sebagai komoditas penting. Paradigma pertama ialah dengan memandang sebagai komoditas strategis, dengan demikian negara akan sibuk mengusik pada politisasi atas isu energi dan intervensi pemerintah dalam mengatur kebijakan mengenai isu energi. Negara cenderung memperjuangkan dengan maksimal karena ketersediaan energi menjadi bagian penting. Paradigma kedua memandang sebagai komoditas pasar, sehingga negara menghadapi isu energi menggunakan mekanisme pasar karena kepentingannya pada profit. Setelah melakukan tinjauan pustaka dengan metode kronologi yang dibagi ke dalam tiga periode, Ramadhanie berargumen bahwa pendefinisian konsep keamanan energi

<sup>32</sup> Arshie Ramadhanie, "Evolusi Konsep Keamanan Energi," *Jurnal Politik Internasional* 19, No. 2 (2017): 98-120, diakses pada 20 Februari 2019, <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/307/221>. Diakses 6 November 2019

perlu dilekatkan pada definisi keamanan yang sesungguhnya agar tidak kehilangan fokus utamanya yaitu ketika kondisi energi suatu negara mengalami ancaman atau “*survival in the face of existential threat*.”<sup>33</sup> Penulis setuju dengan argumen Ramadhanie mengenai konsep keamanan energi yang perlu dilekatkan pada definisi keamanan yang sesungguhnya serta menerapkan paradigma minyak sebagai komoditas strategis dalam mengatur kebijakan luar negerinya. Berkaitan dengan penelitian ini, Indonesia sudah mulai menerapkan paradigma pertama yaitu menerapkan minyak sebagai komoditas penting, kepentingan ini harus diutamakan mengingat urgensi kebutuhan terhadap minyak bumi terus meningkat setiap tahun, apabila tidak dipenuhi dapat mengancam keamanan energi negara sesuai pada definisi keamanan yang sesungguhnya.

Artikel keempat ditulis oleh Fitriani dan Vido Chandra yang berjudul *Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)* dari *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*. Sesuai dengan kerangka waktu penelitian yang penulis lakukan, artikel ini juga membahas tentang analisis kinerja Kemlu RI pada masa pemerintahan Jokowi di periode pertamanya. Program Nawa Cita yang dicanangkan Jokowi sangat baik namun masih terdapat kendala dalam merealisasikannya sesuai dengan politik luar negeri Indonesia. Secara khusus dalam upaya diplomasi ekonomi, penulis artikel mendapatkan bahwa kendala tersebut berasal dari luar (internasional) seperti adanya ketidakcocokkan birokrasi dengan negara mitra atau negara tujuan. Sedangkan kendala dari dalam (domestik)

<sup>33</sup> Arshie Ramadhanie, “Evolusi Konsep Keamanan Energi,” *Jurnal Politik Internasional* 19, No. 2 (2017): 98-120, diakses pada 20 Februari 2019, <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/307/221>. Diakses 6 November 2019

menunjukkan kurangnya penataan yang baik antara kementerian dan lembaga-lembaga negara lainnya yang menimbulkan kebingungan ketika menghadapi permasalahan oleh karena tumpang-tindih.<sup>34</sup> Kendala-kendala yang ditemui hasil dari analisis kinerja Kemlu RI selama masa pemerintahan Jokowi ini memberi acuan bagi penelitian yang dilakukan, yaitu kendala dari dalam yang menunjukkan bahwa penataan antara kementerian dan lembaga-lembaga negara lainnya terpisah satu sama lain, sehingga kurang terintegrasikan dengan baik. Diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Aljazair dilakukan oleh aktor lain (bukan diplomat atau perwakilan Kemlu RI) melainkan oleh kementerian lain. Pola ini menunjukkan adanya diplomasi multi-jalur yang disebabkan oleh tidak adanya penataan yang baik antara kementerian dan lembaga-lembaga negara lainnya yang mengharuskan kementerian lain yang melakukan diplomasi ekonomi dengan negara tujuan.

Artikel terakhir, yang kelima ditulis oleh Andi Kurniawan yang berjudul *Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Thailand Terhadap Pasar Timur-Tengah* dari Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artikel ini memberi pemahaman bahwa Indonesia perlu belajar dari Thailand dalam melaksanakan diplomasi ekonomi pada pasar di Timur-Tengah. Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah memiliki kesamaan dasar seperti memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam, seharusnya ini menjadi langkah yang mudah untuk maju dan menjalankan diplomasi ekonomi di Timur-Tengah. Namun, menurut Kurniawan ada perilaku Indonesia yang perlu menjadi catatan untuk diubah dengan belajar

<sup>34</sup> Fitriani dan Vido Chandra P, *Analisis Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia (2015-2018)* (Jakarta: CSIS, 2018), hlm 20-21.

dari keberhasilan yang Thailand lakukan ketika melakukan diplomasi ekonomi di pasar Timur-Tengah. Indonesia memiliki sejumlah barang yang dapat terus ditingkatkan jumlah ekspornya ke pasar Timur-Tengah seperti pada produk elektronik, permesinan, kendaraan bermotor, barang-barang berbahan karet, dan produk makanan olahan. Nilai ekspor Indonesia jauh di bawah Thailand oleh karena belum membangun kedekatan hubungan bilateral dengan negara tujuan (pasar non tradisional) untuk memperluas akses pasar dan belum adanya promosi ekspor yang seharusnya didukung oleh kolaborasi antara pemerintah dan swasta agar membuka peluang investasi dan mengurangi hambatan-hambatan perdagangan dalam diplomasi ekonomi.<sup>35</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, mengarah pada pasar non tradisional di daerah Afrika Utara, Indonesia sudah memiliki hubungan kedekatan yang baik dengan negara sahabat yaitu Aljazair. Kondisi ini dapat memudahkan Indonesia untuk mengembangkan pasar non tradisional ke negara-negara Afrika lainnya, secara khusus dalam melakukan diplomasi ekonomi untuk mengejar kepentingan nasional di wilayah Afrika. Dengan harapan, penelitian ini dapat membuktikan bahwa kedekatan Indonesia dan Aljazair dapat membuka peluang bagi Indonesia dalam membangun hubungan dengan negara-negara Afrika lainnya untuk mengejar kepentingan Indonesia di negara-negara Afrika dalam mengembangkan pasar non tradisionalnya disana.

Artikel-artikel yang telah dipaparkan belum memberi kontribusi sepenuhnya mengenai kesulitan yang dihadapi dalam menghadapi krisis minyak bumi di

<sup>35</sup> Andi Kurniawan, "Diplomasi Ekonomi Indonesia dan Thailand terhadap Pasar Timur-Tengah," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 17, No. 3 (2014): 254-271.

Indonesia. Besar harapan penelitian ini dapat mengisi kekosongan ini dengan landasan akademis. Penulis akan mengembangkan argumen mengenai upaya diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Aljazair yang akan dilandasi oleh teori-teori dalam kerangka pemikiran.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Penulis menggunakan teori dan konsep ilmu hubungan internasional sebagai alat dalam kerangka berpikir untuk menganalisis perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Studi hubungan internasional mempelajari tindakan dan interaksi antar negara di bidang politik. Bergantinya zaman membawa perubahan pada aktor dan ruang lingkup dalam studi hubungan internasional.<sup>36</sup> Tidak hanya negara tetapi aktor non-negara juga menjadi aktor penting dalam hubungan internasional seperti organisasi internasional dan individu. Ruang lingkup yang besar mencakup bidang ekonomi, sosial, dan budaya menjadikan ilmu hubungan internasional bidang studi yang interdisipliner.<sup>37</sup>

Kerangka pemikiran pertama yang digunakan adalah teori politik luar negeri, yang diartikan sebagai aktivitas dari hubungan antar aktor “resmi” - resmi yang dimaksudkan ialah aktor independen - baik itu negara maupun aktor non-negara dalam hubungan internasional.<sup>38</sup> Keputusan negara untuk menentukan sikap dan

<sup>36</sup> Robert Houghwout Jackson dan Georg Ole Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (United Kingdom: Oxford University Press, 1999).

<sup>37</sup> Suffri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989).

<sup>38</sup> Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy*, ed. 2 (New York: Palgrave, 2016), hlm 4-5.

menjalin hubungan dengan negara lain didasari pada politik luar negeri. Pada dasarnya tujuan politik luar negeri suatu negara dibentuk untuk menghadapi peluang, ancaman, dan tindakan dalam sistem internasional dengan memanfaatkan *power* yang dimiliki melalui berbagai cara, salah satunya ialah diplomasi.<sup>39</sup>

Politik luar negeri juga menunjukkan kemana arah negara akan melakukan sebuah tindakan untuk memperjuangkan kepentingannya dalam berinteraksi dengan negara lain atau aktor lain selain negara dalam lingkup internasional.<sup>40</sup> Kepentingan suatu negara terkadang berbenturan dengan negara lain, namun apabila kepentingan antar negara sejalan, interaksi dapat berjalan dengan lancar demi mencapai kepentingan masing-masing melalui kesepakatan yang dibuat antara pihak yang terlibat.<sup>41</sup> Ketika negara telah menentukan sikap menghadapi proses sosial dalam hubungan internasional, sasaran selanjutnya adalah bagaimana negara membentuk kebijakan luar negerinya untuk mengejar kepentingan negara.

Dalam memperjuangkan kepentingan nasional, ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh suatu negara. Pertama, dengan mengikuti aliran realisme atau idealis, untuk mendapatkan kepentingan nasional, negara mengambil sikap melakukan pertimbangan kekuatan karena menghendaki adanya ketertiban dan keadilan dunia, kepentingan bersama, berdasarkan hukum internasional, dan

<sup>39</sup> I.G Wahyu Wicaksana, "Epistemologi Politik Luar Negeri," *Global dan Strategis* 1, No. 1 (2007), hlm 1-8.

<sup>40</sup> Suffri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989).

<sup>41</sup> Dahlan Nasution, *Konsep Politik Internasional* (Bandung: Erlangga 1983), hlm 127.

kesepahaman atas perundingan.<sup>42</sup> Kedua, dengan melakukan pendekatan memanfaatkan sumber negara yang diselaraskan dengan kepentingan nasional.<sup>43</sup> Menghadapi permasalahan yang menyangkut pada hubungan internasional atau urusan luar negeri, terdapat badan atau organisasi khusus seperti, kepala pemerintahan baik itu presiden atau perdana menteri, menteri luar negeri atau departemen luar negeri, dinas diplomatik, dan departemen-departemen lainnya yang memiliki orientasi khusus terkait urusan luar negeri.<sup>44</sup> Peranannya di luar menjamin kepentingan negara sedangkan perannya di dalam mempengaruhi stabilitas negara. Untuk melaksanakan visi misi negara dalam hubungan internasional yang sudah dibulatkan dalam politik luar negeri, seorang diplomat atau duta besar dibawah kementerian luar negeri memiliki tanggung jawab langsung untuk mengaturnya.

Politik luar negeri membentuk hubungan antar negara ke dalam berbagai tatatan yaitu bilateral, multilateral, dan regional. Hubungan antar negara merupakan refleksi dari interaksi dalam dunia internasional. Implementasi dari politik luar negeri mengarah pada bagaimana negara merespon hubungannya dengan negara lain dengan memanfaatkan *power* yang dimiliki. Susan Strange menjelaskan bahwa terdapat empat struktur *power* dalam hubungan internasional, antara lain keamanan, uang, perdagangan, dan informasi.<sup>45</sup> Implementasi *power*

<sup>42</sup> Suffri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm 85.

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy*, ed. 2 (New York: Palgrave, 2016), hlm 142.

negara dapat berujung pada penggunaan kekuatan (*hard power*) atau sekedar mempengaruhi pihak lain (*soft power*). Penelitian ini akan berfokus pada politik luar negeri yang menggunakan *soft power* yaitu diplomasi sebagai instrumen dalam pencapaiannya.

Kerangka pemikiran yang kedua adalah teori diplomasi komersial. Barston memberikan definisi diplomasi sendiri sebagai manajemen pada hubungan internasional antara aktor-aktor hubungan internasional yang secara aktif melakukan upaya untuk menyampaikan, merepresentasi, mengkoordinasi, dan mengamankan kepentingan nasional, dengan cara korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, lobi, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional.<sup>46</sup> Empat fungsi diplomasi antara lain, komunikasi, negosiasi, partisipasi dalam lembaga multilateral, dan promosi ekonomi.<sup>47</sup> Diplomasi sendiri dinilai berhasil apabila kepentingan nasional yang dirumuskan diawal pada kebijakan luar negeri berhasil dicapai.<sup>48</sup>

Diplomasi antara Indonesia dan Aljazair merupakan hubungan luar negeri pada tingkat bilateral. Negosiasi dilakukan dengan hanya melibatkan dua negara, menghasilkan perjanjian yang cenderung untuk jangka waktu pendek, tukar

<sup>46</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm 4.

<sup>47</sup> Christopher Hill, *The Changing Politics of Foreign Policy*, ed. 2 (New York: Palgrave, 2016), hlm 158.

<sup>48</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm 14.



menukar Duta Besar, dan aktif melakukan kunjungan kenegaraan.<sup>49</sup> Hubungan bilateral diawali ketika antar aktor membangun hubungan yang mengikatkan satu sama lain.<sup>50</sup> Terdapat enam aspek yang menjadi dasar terbentuknya sebuah hubungan bilateral. Pertama, inisiasi kontak, dimulai ketika muncul ketertarikan pada hubungan yang baru. Ketika salah satu negara baru merdeka, muncul ketertarikan untuk menjalin hubungan, dengan harapan adanya peluang keuntungan yang akan didapat melalui kerja sama.<sup>51</sup> Kedua, hubungan bilateral terbentuk ketika kedua aktor aktif berdialog dan saling melakukan kunjungan kenegaraan, ketertarikan dipicu oleh adanya kepastian dalam misi eskplorasi.<sup>52</sup> Ketiga, hubungan bilateral terbentuk oleh adanya perjanjian atau nota kesepahaman.<sup>53</sup> Keempat, ketika bergabung dalam satu organisasi internasional yang sama terjadi mekanisme konsultasi pada pertemuan komisi setiap tahun, saling berbagi kepentingan, dan biasanya terkait pada masalah ekonomi.<sup>54</sup> Kelima, kerjasama bidang fungsional, didorong oleh adanya kegiatan pertukaran budaya, media, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hubungan antar daerah.<sup>55</sup> Dan yang terakhir adalah kerjasama regional yang dilakukan untuk tujuan pembangunan ekonomi, transportasi, dan eksploitasi sumber daya bagi

<sup>49</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm 85.

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Kishan S. Rana, *Bilateral Diplomacy* (New Delhi: Manas Publication, 2002), hlm 37-40.

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Ibid.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ibid.

kepentingan bersama.<sup>56</sup> Aspek-aspek tersebut yang biasanya menjadi dasar dari hubungan bilateral sekaligus mengimplementasikan kebijakan politik luar negerinya.

Berangkat dari politik luar negeri, untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi suatu negara, menurut Adam Smith prinsip perdagangan internasional dirasa tidak diperlukan dan tidak menjamin kemajuan ekonomi suatu negara.<sup>57</sup> Smith berpendapat bahwa yang menentukan kemajuan ekonomi suatu negara adalah *power* negara itu sendiri. Pendapat Smith dari sudut pandang realis ini ditentang oleh Norman Angell yang melihat kepentingan perdagangan internasional dari sudut pandang liberalis. Menghadapi era industrialisasi, justru perdagangan internasional menjadi kepentingan negara untuk memperluas pasar, meningkatkan ekspor, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>58</sup> Setiap negara saling berbagi sumber daya ekonominya sesuai dengan keunggulan masing-masing agar mencapai keuntungan bersama.

Saner dan Yiu memaknai diplomasi komersial sebagai bagian dari diplomasi ekonomi.<sup>59</sup> Berbeda dengan diplomasi komersial, diplomasi ekonomi melibatkan aktor-aktor yang lebih luas seperti *World Trade Organisation* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), dan *Organisation for Economic Co-*

<sup>56</sup> Kishan S. Rana, *Bilateral Diplomacy* (New Delhi: Manas Publication, 2002), hlm 37-40.

<sup>57</sup> George T. Crane dan Abla Amawi, ed, *The Theoretical Evolution of International Political Economy* (Oxford: Oxford University Press, 1991), hlm 55.

<sup>58</sup> Norman Angell, *The Great Illusion: A Study of the relation of military power in nations to their economic and social advantage* (London: Heinemann, 1911).

<sup>59</sup> Raymond Saner dan Lichia Yiu, "International Economic Diplomacy: Mutations in the Postmodern Times," *Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael"* No. 84 (2003): 2-31.

*operation and Development* (OECD) sebagai pihak netral dalam menghadapi permasalahan. Sedangkan diplomasi komersial hanya melibatkan perwakilan pemerintah seperti, kementerian terkait atau yang bersangkutan dengan perdagangan, termasuk diplomat, serta pelaku usaha atau perusahaan terkait. Diplomasi menjadi tepat sasaran bila dilakukan oleh aktor yang datang dari pelaku bisnis sehingga kepentingan perdagangan dapat lebih mudah untuk dicapai ketika melakukan kerja sama ekonomi. Komposisi aktor-aktor yang terlibat terdiri dari *Trade Promotion Organization* (TPO) dan/atau *Investment Promotion Agency* (IPA).<sup>60</sup> Peran perwakilan negara atau diplomat menjadi sangat terbantu. Selain itu, dinilai lebih efektif karena sifatnya yang informal, dapat membangun komunikasi lebih intim ketika harus melakukan pertukaran informasi dan dapat mengurangi ketegangan ketika bernegosiasi.<sup>61</sup>

Hal ini berkaitan dengan kerja sama Indonesia dan Aljazair yang memanfaatkan diplomasi komersial sebagai sarana untuk mencapai kepentingan nasional, melalui promosi perdagangan dan promosi peluang investasi. Makna diplomasi ekonomi yang dimaksudkan Jokowi dalam program Nawa Cita begitu luas, mengingat aktivitas ekonomi juga sangat beragam. Sementara itu, diplomasi komersial memiliki arti yang lebih spesifik yaitu, promosi perdagangan dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional serta promosi peluang investasi ke

<sup>60</sup> Michel Kostecki dan Olivier Naray, *Commercial Diplomacy and International Business* (Clingendael: Netherland Institute of International Relations, 2007), hlm 1-3.

<sup>61</sup> Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008).

dalam atau ke luar.<sup>62</sup> Melakukan negosiasi, mengkoordinir, menyediakan informasi terkait peluang perdagangan atau investasi, serta berlaku sebagai tuan rumah dalam menjalankan misi adalah peran yang dijalankan diplomat komersial sebagai perwakilan negara.<sup>63</sup>

Diplomat ditugaskan untuk menghadapi isu-isu baru seperti pada konsep keamanan non tradisional sejalan dengan yang disebutkan Mely Caballero pada bukunya yaitu, “*food security, water security, climate change, human trafficking, pandemics, cross-border conflicts, and energy security.*”<sup>64</sup> Berangkat dari pendekatan *human security*, membahas masalah energi perlu mencakup tiga tingkat yang saling mempengaruhi satu sama lain, antara lain tingkat internasional, nasional, dan individu.<sup>65</sup> Pada tingkat internasional, bagian ini membahas bagaimana negara-negara menghadapi permasalahan energi, mengingat tidak semua negara memiliki sumber energinya sendiri, beberapa masih harus bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan energi. Tingkat kedua ialah nasional, membahas upaya negara dalam menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan nasional secara merata, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Dan yang terakhir adalah individu sebagai konsumen langsung dari energi tersebut.<sup>66</sup>

<sup>62</sup> Raymond Saner dan Lichia Yiu, “International Economic Diplomacy: Mutations in the Postmodern Times,” *Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of International Relations “Clingendael”* No. 84 (2003): 2-31.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Mely Caballero-Anthony dan Nur Azha Putra, *Spring Briefs in Environment, Security, Development and Peace*, ed. Hans Günter Brauch (New York: Springer, 2012), hlm 2.

<sup>65</sup> Ibid. hlm 4.

<sup>66</sup> Ibid.

Kerangka teori yang terakhir adalah konsep *energy security* atau keamanan energi pada minyak bumi. Pasca Perang Dingin, permintaan minyak bumi semakin meningkat oleh karena adanya pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun diikuti dengan aktivitas ekonomi-industri yang juga membutuhkan minyak bumi.<sup>67</sup> Sehingga ketersediaan minyak bumi negara perlu dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan negara. Negara-negara di dunia, secara khusus negara berkembang masih sangat bergantung pada energi fosil.<sup>68</sup> Pada dasarnya negara berkembang memanfaatkan minyak bumi sebagai penunjang kebutuhan dasar masyarakat untuk memproduksi makanan, menyediakan fasilitas kesehatan, manufaktur, alat pemanas, listrik, serta kebutuhan militer.<sup>69</sup> Kebutuhan negara terhadap energi fosil semakin meningkat oleh karena setiap negara mulai melakukan antisipasi untuk mempersiapkan cadangan minyak hingga jangka waktu panjang, dengan mempertimbangkan jumlah populasi dunia yang terus meningkat dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang.<sup>70</sup>

Mely Caballero menjelaskan bahwa kerangka dari keamanan energi terbentuk dari *security* (keamanan); *stability* (stabilitas); dan *sustainability* (keberlanjutan). Ketika membahas mengenai keamanan, berarti menyinggung juga perspektif geopolitik yang membahas hubungan antara negara-negara yang saling berjuang untuk kebutuhan energi.<sup>71</sup> Ketika negara saling bekerjasama dalam menghadapi

<sup>67</sup> Daojiong Zha, *Energy Security*, ed (India: SAGE Publication, 2016), hlm 135.

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Gal Luft dan Anne Korin, *Energy Security Challenges for the 21<sup>st</sup> Century: A Reference Handbook* (California: ABC-CLIO, LLC, 2009), hlm 13-16.

<sup>71</sup> Ibid.

permasalahan energi maka dapat membentuk keamanan seperti yang diharapkan baik itu keamanan internasional maupun keamanan energi.<sup>72</sup> Aspek stabilitas dipakai untuk meninjau jumlah permintaan dan penawaran energi agar tetap pada harga yang stabil. Selain itu, stabilitas politik dan ekonomi nasional serta kebijakan-kebijakan pemerintah juga mempengaruhi harga pada energi.<sup>73</sup> Aspek terakhir ialah keberlanjutan, mengingat sumber energi fosil merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui maka sebelum sumber energi tersebut habis perlu melakukan adaptasi sejak dini untuk mempercepat transisi penggunaan energi terbarukan sebagai pengganti energi fosil.<sup>74</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, untuk menyimpulkan definisi ketahanan energi bagi Indonesia sendiri sebagai objek penelitian dengan statusnya sebagai negara pengimpor minyak maka definisi ketahanan energi bagi Indonesia adalah suatu kondisi ketersediaan minyak bumi yang dimiliki sebagai hasil dari berbagai upaya diplomatis yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nasional dengan mempertimbangkan aspek keamanan, stabilitas, dan keberlanjutan.<sup>75</sup> Setiap negara membutuhkan energi sebagai pertahanan. Bagaiman upayanya mengakses, memperoleh, dan mengolah, tergantung pada kemampuan masing-masing negara.

<sup>72</sup> Mely Caballero-Anthony dan Nur Azha Putra, *Spring Briefs in Environment, Security, Development and Peace*, ed. Hans Günter Brauch (New York: Springer, 2012), hlm 4-5

<sup>73</sup> Ibid.

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid.

## 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis upaya diplomasi ekonomi antara Indonesia dengan Aljazair untuk mencapai keamanan energi pada minyak bumi di Indonesia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh John W. Creswell mengenai metode penelitian kualitatif deskriptif dalam bukunya yang berjudul “*Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches.*” Karakteristik dari penelitian kualitatif ini adalah memanfaatkan sumber data yang beraneka ragam dari data sekunder seperti studi pustaka pada dokumen-dokumen yang dipublikasikan.<sup>76</sup> Tahapan penelitian ini terdiri dari tiga bagian. *Pertama*, pengumpulan data sekunder. *Kedua*, menganalisa data-data yang telah terkumpul, menggunakan teori dan konsep ilmu hubungan internasional seperti diplomasi ekonomi dan keamanan energi pada minyak bumi sebagai pilar dari penelitian ini. *Ketiga*, menginterpretasikan hasil analisis pada penelitian ini sehingga mencapai kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia terhadap Aljazair pada dimensi ketersediaan dan keberlanjutan untuk mencapai keamanan energi pada minyak bumi di Indonesia.

<sup>76</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Los Angeles: SAGE, 2009).

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data mengenai upaya diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Aljazair dengan menggunakan teknik studi pustaka, mengumpulkan dokumen-dokumen berupa: jurnal, laporan tahunan, artikel dalam majalah/koran, dan pernyataan pers. Studi pustaka ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang didapatkan dari laporan tahunan Dewan Energi Nasional, Kementerian Luar Negeri Indonesia, laporan tahunan dari lembaga terkait termasuk perusahaan minyak milik Indonesia dan Aljazair, laporan dari lembaga independen formal, jurnal terkait, dan sumber-sumber pustaka lainnya.

### 1.7 Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun pembahasan yang terdiri dari empat bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai permasalahan minyak bumi di Indonesia. Penjabaran permasalahan berdasarkan pada lima dimensi *Energy Security* dari Melly Caballero. Terdapat lima masalah yang ditemukan, antara lain: 1) Kesenjangan *Supply* dan *Demand*; 2) Sektor Minyak Bumi: Bukan Komoditas Strategis; 3) Inkonsistensi Pada Transisi Penggunaan Energi Terbarukan; 4)



Kesenjangan Harga dan Aksesibilitas Masyarakat Rendah; 5) Usia Cadangan Minyak Bumi Tidak Panjang Lagi. Dilanjutkan dengan pemaparan singkat mengenai enam hal yang mendasari hubungan bilateral antara Indonesia dan Aljazair, sebagai pemicu berlangsungnya diplomasi pada kedua negara.

Bab III berisi pembahasan analisis mengenai upaya-upaya diplomasi komersial yang dilakukan Indonesia terhadap Aljazair, dengan cara: 1) Mendorong Perdagangan Ekspor Jasa dan Barang; dan 2) Promosi Peluang Investasi. Pembahasan ditutup dengan pemaparan dampak dari diplomasi komersial bagi kondisi minyak bumi di Indonesia.

Bab IV menjadi bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.